



## **PERKAWINAN ELIT ISTANA DI SAMBAS DAN PERUBAHAN LAINNYA PADA ABAD XX**

**Kartika**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*rachmankartika@gmail.com*

**Rusiadi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*kandarusiadi@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This paper examines the pattern of marriage in the Sambas Sultanate in the XX century regarding changes in the marriage of relatives of the Sambas Sultanate, aiming in addition to providing an explanation and description of the marriage pattern of the relatives of the twentieth century Sultanate of Sambas, also providing information and clarity on the factors that influence the occurrence of changes in the marriage pattern of the relatives of the XX century Sambas Sultanate. The description in this paper aims to make a systematic and objective reconstruction of the past, which is done by collecting, evaluating, synthesizing, and verifying evidence to establish facts, and obtain strong conclusions. The results of this study indicate that the marriage pattern of the relatives of the Sultanate of the twentieth century has changed. Marriages that were originally closed to relatives of the Sultanate and elites from other Sultanates, over time there was a transformation from a closed marriage pattern to a more open pattern. There are several factors that caused these changes, namely the birth of educated people and changes in the power of the Sultanate which caused the decline in the authority of the Sambas Sultanate.*

**Keywords:** *Marriage, Sambas Sultanate, XX century*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini meneliti tentang pola perkawinan di Kesultanan Sambas abad XX mengenai perubahan perkawinan kerabat Kesultanan Sambas, bertujuan selain memberikan penjelasan dan gambaran pola perkawinan kerabat Kesultanan abad XX juga memberikan informasi dan kejelasan faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pola perkawinan pada kerabat Kesultanan Sambas abad XX. Gambaran dalam tulisan ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, mensintesis, dan memverifikasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta, dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pola perkawinan kerabat Kesultanan abad XX mengalami perubahan. Perkawinan yang semula tertutup untuk kalangan kerabat Kesultanan dan kaum elit dari Kesultanan lain, seiring berjalannya waktu terjadi transformasi dari pola perkawinan tertutup ke pola lebih terbuka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan tersebut yaitu lahirnya kaum terdidik dan perubahan kekuasaan Kesultanan yang menyebabkan menurunnya wibawa Kesultanan Sambas.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kesultanan Sambas, abad XX

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya dalam berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional baik itu dalam keragaman adat, seni budaya dan tradisi. Secara umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup dalam suatu masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran, guna menjadi acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas (2013;i).

Kalimantan Barat sebagai salah satu propinsi yang ada di Indonesia tentunya memiliki kebudayaan tersendiri. Memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerahnya, salah satunya Kabupaten Sambas dalam sejarahnya merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang berpusat di Istana Alwatzikhoebillah Sambas. Kebudayaan yang ada di Kesultanan Sambas memiliki ciri khas tersendiri dari daerah lainnya baik itu dari adat istiadat, bahasa, kesenian daerah maupun sistem perkawinannya. Pola kekerabatan Kesultanan Sambas dalam pelaksanaan perkawinan menerapkan garis keturunan Partilineal, yang mana dalam keluarga tersebut menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak dari laki-laki saja. Laki-laki ditempatkan sebagai dasar dalam pemegang kekuasaan, pemerintahan, sebagai seorang Raja Yang Dipertuan Agung.

Perkawinan secara umum bersifat tertutup, artinya perkawinan hanya dilakukan sesama kerabat Kesultanan, rakyat biasa atau masyarakat umum tidak bisa menikah dengan orang yang berdarah bangsawan. Oleh karena itu seringkali dalam perkawinan dilakukan dengan mengabaikan aspek biologis demi untuk mempertahankan harta, gelar dan kekuasaan agar tidak jatuh ke pihak lain, seperti dengan menjodohkan sepupu sesama sepupu atau sesama kerabat Kesultanan.

Selain sesama kerabat, perkawinan juga dilakukan antar elit Kesultanan yang ada di Kalimantan Barat, seperti Kerajaan Sambas dan Mempawah. Namun seiring berjalannya waktu perkawinan di lingkungan Kesultanan Sambas mengalami perubahan yakni lebih terbuka yang memungkinkan masuknya masyarakat umum dalam pola kekerabatan Kesultanan.

Perubahan pola perkawinan yang terjadi di Kesultanan Sambas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis menjadi penting untuk diteliti, karena perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan adanya pergeseran adat yang berlaku di Kesultanan dan mengubah struktur sosial masyarakat Sambas. Perubahan struktur sosial tersebut mencakup perubahan

penarikan garis keturunan, adat menetap setelah menikah, dan hak atas waris. Adanya perubahan tidak terlepas dari perkembangan pola pikir karena pendidikan yang semakin modern menyebabkan sebagian kerabat Kesultanan lebih memilih untuk menjalani kehidupan normal layaknya masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi pemerintahan yang ada sudah tidak lagi mengedepankan kekuasaan kepada Kesultanan tetapi telah berubah mengikuti pemerintahan pusat, sehingga Kesultanan yang ada hanya sebagai simbol dari kebudayaan itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Guna mempermudah dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan multidisipliner guna memecahkan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan empat pendekatan.

Pendekatan perilaku (*behaviorisme*). Pendekatan untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman, behaviorisme menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang tampak dan dapat diukur. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajar itulah ia berperilaku, sarifitriawulandari.blogspot.com (2012). Terkait dengan perubahan sistem perkawinan, dapat dilihat dari latar belakang kehidupan setelah terjadinya perkawinan yang dilakukan kerabat keraton dengan rakyat biasa, meskipun pada saat itu ada tantangan dari kalangan Istana. Namun demikian dengan adanya perkawinan tersebut terciptanya hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat, yang menandakan terciptanya hubungan sosial yang baik antara kerabat keraton dengan masyarakat.

Pendekatan sosiologi. Digunakan untuk memperhatikan faktor lingkungan tinggal individu dalam perkembangannya dengan melihat beragam kebudayaan dan pola kehidupan masyarakatnya untuk memahami ataupun menggambarkan kehidupan masyarakat mencakup melihat pengaruh ataupun penyebab yang nantinya menjadi faktor yang mendasari terjadinya perubahan perkawinan antar kerabat Kesultanan Sambas.

Pendekatan Antropologi. Mempelajari budaya-budaya suku di Kesultanan, adat istiadat seperti upacara di Kesultanan Sambas, dan budaya perkawinan yang terjadi di Kesultanan melayu pada umumnya dan Kesultanan melayu Sambas khususnya.

Pendekatan Politik. Politik adalah tulang punggung sejarah (*politics is a backbone of history*), yang isinya berkaitan dengan kejadian-kejadian mengenai Raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan dalam memperebutkan kekuasaan, Kuntowijoyo (2003;174). Pendekatan politik yang digunakan dengan maksud untuk mempermudah peneliti dalam melihat kondisi politik dan pola pemerintahan Kesultanan yang mana sangat berpengaruh bagi kelangsungan para penguasa untuk memerintah di Kesultanan Sambas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya dalam menggali fakta-fakta sejarah mengenai kehidupan perkawinan para elit Kesultanan Sambas abad XX, maka perlu dikaji beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah

masa lampau Kesultanan Sambas serta faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi dasar-dasar daripada perubahan tersebut.

### **Sekilas Sejarah Kesultanan Sambas dan Raja yang Memerintah**

Awal untuk mengetahui sejarah Kesultanan Sambas secara menyeluruh, terlebih dahulu melihat ke belakang yakni adanya hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara Kesultanan Sambas, Kerajaan Brunei Darussalam dan Kerajaan Sukadana. Bermula dari Kerajaan Brunei Darussalam berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad (1363-1402). Kemudian selanjutnya pada tahun 1582 Kerajaan Brunei diperintah oleh Pangeran Muhammad Hasan (adik Sultan Muhammad Shah Brunai) bergelar Sultan Muhammad Hassan yang mempunyai tiga orang putra bernama Pangeran Abdul Jalilul Akbar, Pangeran Raja Tengah dan Pangeran Muhammad Ali, Urai Riza Fahmi (2013;1-9). Keturunan Raja Tengah inilah yang menurunkan Raja-Raja di Kesultanan Sambas.

Daerah Sambas sebelum berdirinya Kerajaan Islam, diperintah oleh seorang Raja dari Jawa yang pusat kekuasaannya berada di Kota Lama. Raja tersebut bernama Ratu Sepudak berasal dari keturunan bantara Majapahit yang masih menganut agama Hindu. Beliau mempunyai dua orang putri, yang tertua bernama Raden Mas Ayu Anom yang sudah dikawinkan dengan Pangeran Prabu Kencana dan Putri yang kedua bernama Raden Mas Ayu Bungsu dikawinkan dengan Raden Sulaiman, Urai Riza Fahmi (2013;12). Yang merupakan putera dari Raja Tengah dengan adik Sultan Sukadana yang bernama Putri Surya Kesuma.

Setelah Ratu Sepudak wafat, terjadilah perang saudara, untuk menghindari hal tersebut maka Raden Sulaiman beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya pergi meninggalkan Negeri menuju Kota Bangun. Sampai di Kota Bandir akhirnya mereka berhenti dan mendirikan negeri di situ, Al Barkat (1980;21). Setelah tiga tahun lamanya, kemudian iapun memindahkan pusat pemerintahan ke Simpang sungai Teberau tepatnya di Lubuk Madung. Di tempat inilah melalui musyawarah keluarga, maka pada hari Senin tanggal 10 Zulhijjah 1040 H bertepatan dengan 9 Juli 1631 M dinobatkanlah Raden Sulaiman sebagai Raja pertama di Kesultanan Sambas Islam dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin I.

Sultan Muhammad Syafiuddin menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Raden Bima untuk memerintah Kesultanan Sambas pada 10 Muharram 1080 H bertepatan dengan 10 Juni 1669 M. Raden Bima kemudian bergelar Sultan Muhammad Tajuddin yang menjadi Sultan kedua di Kesultanan Sambas sedangkan Ayahndanya Sultan Muhammad Syafiuddin I diangkat menjadi Yang Dipertuan Sultan Muhammad Syafiuddin. Tidak beberapa lama bertahta di Lubuk Madung, Sultan Muhammad Tajudin berniat untuk memindahkan ibukota kerajaan ke Muara Ulakan di persimpangan Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau. Ibukota kerajaan dibangun lengkap dengan pagar dan paritnya dan menghadap Sungai Sambas Kecil. Untuk pertahanan, dibangun benteng atau kubu pertahanan di muara Sungai Betung.

Masa pemerintahan Sultan Muhammad Tajudin, Kesultanan Sambas berkembang pesat dan mengalami peningkatan baik itu di bidang perdagangan seperti damar dan rotan, di bidang keagamaan dibangun mesjid dan surau-surau kemudian menjalin hubungan politik dengan kerajaan tetangga dengan cara menikahkan putri-putrinya kepada bangsawan kerajaan, seperti Kerajaan Mempawah, Brunei, Aceh, Sanggau dan Trenggangan. Sultan Muhammad Tajuddin memerintah kurang lebih 40 tahun dan wafat pada hari Jumat, 1 Syafar

1120 H atau 21 april 1708 M dalam usia 65 tahun. Untuk menggantikannya maka diangkatlah anaknya Raden Milian bergelar Sultan Umar Aqamaddin I pada hari Sabtu, 2 Syafar 1120 atau 22 April 1708 M sebagai Sultan Sambas yang ketiga.

Selama Kesultanan Sambas diperintah oleh Sultan Umar Aqamaddin I, rakyat Sambas hidup makmur dan berkecukupan. Agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan sehingga banyak para mubaliq berdatangan ke Sambas. Dalam mengambil keputusan, Sultan bersifat adil dan bijaksana sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bersama permaisurinya yaitu Utin Kumala (bergelar Ratu Agung) yang merupakan anak dari Raden Ratna Dewi Binti Sultan Muhammad Syafiuddin I, Baginda mempunyai 3 orang putra-putri.

Setelah Sultan Umar Aqamaddin I wafat, maka dinobatkan Raden Bungsu menjadi Sultan Sambas yang keempat pada hari Sabtu, 3 Rabiul Awal 1145 H atau 23 Agustus 1732 M bergelar Sultan Abubakar Kamaluddin. Selama pemeritahannya Sultan melanjutkan cita-cita Sultan yang terdahulu yaitu untuk memajukan dan memakmurkan rakyat Sambas. Bersama permaisurinya Pangeran Zainab dikaruniai tujuh putra-putri dan dinikahkan dengan kerabat Kesultanan maupun dari kerajaan tetangga, sampai akhirnya wafat pada hari Senin, 8 Rajab 1175 H atau 1 Februari 1762 M dalam usia 65 tahun.

Kesultanan Sambas selanjutnya diperintah oleh putra dari Sultan Abubakar Kamaludin yaitu Raden Jama' yang dinobatkan pada hari Selasa 9 Rajab 1175 atau 2 Februari 1762 M dan bergelar Sultan Umar Aqamaddin II. Kekuasaan Kesultanan Sambas kemudian di bawah kepemimpinan Raden Gayung bergelar Sultan Muda Ahmad Tadjudin sebagai Sultan yang keenam, dilahirkan pada hari Senin, 1 Sya'ban 1165 H atau 13 Juni 1752 M. Raden Gayung merupakan putra dari Sultan Umar Aqamaddin II. Sultan Muda Ahmad Tajudin merupakan Sultan yang kuat sehingga pada saat Kesultanan Sambas dibawah pemerintahannya dapat mengalahkan Kerajaan Siak sehingga kemenangan berada di pihak Kesultanan Sambas.

Raden Mantri merupakan putra kedua Yang Dipertuan Baginda Sultan Umar Aqamaddin II dengan permaisuri yang kedua bernama Mas Siti bergelar Mas Sultan Baginda. Raden Mantri menggantikan Ayahnya memerintah Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Abubakar Tadjuddin I pada hari Selasa, 11 Zulqaidah 1216 H atau 11 Maret 1802 M menjadi Sultan yang ketujuh. Pada waktu pemerintahan Sultan Abubakar Tadjuddin I, Kesultanan Sambas kembali diserang oleh Kerajaan Siak, banyak memakan korban dari kedua belah pihak tetapi akhirnya dapat dipukul mundur kembali dibawah kepemimpinan Pangeran Anum (Raden Pasu). Lalu, terjadi pertikaian antara Kongsi Emas Cina, selanjutnya Kesultanan Sambas diserang oleh Kerajaan Inggris tanggal 24 Juli 1812 M. Pasukan dari Kesultanan Sambas mengalami kekalahan dan Pangeran Muda yang memimpin saat itupun tewas terkepung. Sultan Abubakar Tadjuddin dan keluarga lalu melarikan diri ke Gunung Senujuh dan akhirnya meninggal dunia karena kelelahan di usianya yang cukup tua.

Pangeran Anum kemudian diangkat sebagai Sultan ke delapan menggantikan Sultan Abubakar Tadjuddin I untuk memerintah di Kesultanan Sambas lalu bergelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin I. Mempunyai dua permaisuri dan dua orang selir, Sultan dikaruniai 6 orang putra-putri yang salah satunya telah meninggal waktu melawan Inggris (Pangeran Muda) anak dari permaisuri pertama, Sultan wafat dalam usia 63 tahun pada malam Senin, 2 Muharram 1244 H atau 14 Juli 1828 H.

Pemerintahan selanjutnya jatuh kepada Putra Mahkota Pangeran Ratu Nata Kesuma, tetapi karena usianya saat itu masih 6 tahun, maka ditunjuklah Raden Sumba yang bergelar

Pangeran Bendahara Seri Maharaja, kemudian bergelar Sultan Umar Kamaluddin menjadi Sultan Sambas yang ke sembilan sambil menunggu Pangeran Ratu Nata Kesuma dewasa, melalui persetujuan Majelis Wali dengan *Besluit Gubernumen* Belanda tanggal 6 Mei 1829. Majelis dihadiri oleh kerabat Sultan, sebagai ketua umumnya yaitu Asisten Residen Belanda, sebagai ketua Sultan Usman Kamaluddin, dan anggotanya adalah Pangeran Temenggung Jaya Kesuma dan Pangeran Kesuma Dilaga. Sultan Umar Kamaluddin wafat pada malam Kamis, 7 Ramadhan 1247 H atau 8 Februari 1832 M dalam usia 63 tahun.

Diangkatlah saudara dari Sultan Umar Kamaluddin yaitu Raden Semar atau Pangeran Temenggung Jaya Kesuma menjadi Sultan yang kesepuluh bergelar Sultan Umar Aqamaddin III pada 8 Ramadhan 1247 H atau 9 Februari 1832 M. Pada masa pemerintahannya Sultan juga mengikat perjanjian dengan pemerintah Belanda. Saat Sultan wafat pada 1 Muharram 1263 H atau 9 Desember 1846 M, diangkatlah Sultan Muda Pangeran Mahkota Pangeran Ratu Nata Kesuma karena telah dewasa sebagai Sultan yang ke-11 dengan gelar Sultan Abubakar Tadjuddin II. Bersama permaisurinya Ratu Sabar, Sultan dikaruniai dua orang putra, dan dengan kedua selirnya Sultan mempunyai putra-putri 10 orang.

Sultan Abubakar Tadjuddin kemudian diasingkan ke Jawa karena terlibat perselisihan dan sebagai gantinya diangkat putranya untuk menjadi Sultan yaitu Pangeran Afifuddin. Karena usianya masih muda, maka digantikan dengan Wakil Sultan yang saat itu dijabat oleh Pangeran Mangku Negara menjadi Sultan yang ke-12 bergelar Sultan Umar Kamaluddin. Bersama empat permaisuri, Sultan dikaruniai 31 putra-putri. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Putra Mahkota Pangeran Adipati Afifuddin tepatnya pada 6 Agustus 1866.

Kesultanan Sambas mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II yang memerintah selama 56 tahun lamanya. Sultan Muhammad Syafiuddin II bersama permaisurinya Raden Siti Kahlijah bergelar Ratu Anum Kesumaningrat binti Sultan Umar Kamaluddin mempunyai 7 orang putra-putri dan dengan selirnya Enci' Nauyah baginda dikaruniai 7 orang putra-putri juga, Urai Riza Fahmi (2013;19-56).

Anak dari Sultan Muhammad Syafiuddin II yaitu Pangeran Adipati merupakan Putra Mahkota yang tidak sempat menjadi Sultan karena wafat dalam usia yang cukup muda pada tahun 1916 M. Maka diangkatlah anak dari Pangeran Adipati yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim sebagai Putra Mahkota. Namun karena waktu itu Raden Muhammad Mulia Ibrahim masih kecil lalu diangkatlah anak dari selir Pangeran Adipati yaitu Raden Muhammad Ariadiningrat sebagai Wakil Sultan bergelar Sultan Muhammad Ali Syafiuddin II pada 4 Desember 1922 sebagai Sultan yang ke-14.

Setelah Sultan Muhammad Ali Syafiuddin II wafat pada 9 Oktober 1926, maka diangkatlah Putra Mahkota Sultan Muhammad Mulia Ibrahim sebagai Sultan ke-15 dengan gelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin, bersama istrinya Raden Marhum Siti binti Pangeran Bendahara Seri Maharaja Muhammad Tayeb mempunyai tujuh orang putra-putri. Setelah Sultan Muhammad Mulia Tsafiuddin wafat pada tahun 1943, hingga pada tahun 1946 Kesultanan Sambas mengalami kekosongan pemerintahan karena Pangeran Ratu Raden Muhammad Taufik masih kecil.

### **Kehidupan Sekitar Kesultanan Sambas**

Demi menjaga kewibawaan Sultan dibuatlah peraturan tentang gelaran dan tata bahasa sehari-hari yang dituangkan dalam sebuah peraturan disebut *Qaa Nuun* dan

peraturan-peraturan turunan yang tidak terdapat dalam *Qaa Nuun*. Gelaran yang diberikan oleh Sultan bersifat insidentil kedaerahan dalam Kesultanan Sambas, dan menjadi kebanggaan bagi mereka yang mendapat gelaran. Sebutan atau gelaran tersebut seperti yang ditulis oleh H. Abdullah Kadir dalam catatan kaki tentang *Gelaran Turun Temurun Kepada Keluarga Raja dalam Kesultanan Sambas*.

Sebutan atau gelaran terhadap Sultan yang berkuasa Yang Mulia atau Duli Yang Mulia, sebutan atau gelaran terhadap Sultan yang non aktif karena sudah lanjut usia atau sudah uzur sakit-sakitan Yang Dipertuan. Sedangkan sebutan atau gelaran terhadap Sultan yang sudah mangkat disebut dengan Almarhum atau Murhum atau Syurgi, sebutan atau gelaran terhadap Wazir atau Menteri kerajaan disebut Paduka Tuan. Gelaran terhadap putra-putri Sultan, putra-putri Wazir atau Menteri, putra-putri Sultan yang menikah sesama keluarga bangsawan diberi gelar Raden. Sebutan yang sama apabila putra Raja Sultan yang menikah dengan keluarga bukan bangsawan, anaknya bergelar Raden. Pengertian nama Raden berasal dari kata Rahadi atau boleh disebut darah suci. Anak Wazir kawin sesama anak Wazir dan anak Urai lelaki kawin dengan anak bukan Urai, maka anaknya bergelar Urai. Kalau anak perempuan Urai berkawin dengan anak bukan Urai, maka anaknya tidak mendapat gelar Urai, menjadi gugur lah kebangsawannya. Pengertian nama Urai berasal dari kata kependekan Emas Urai. Gelaran terhadap putra-putri bukan dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa yaitu anak putra-putri dari Kiayi pengawal pribadi Yang Mulia Sultan (Ajudan Sultan), Kiayi waktu diangkat oleh Raja (Sultan) digelar Mas, isteri Kiayi bergelar Nyemas dan putra-putrinya bergelar Mas turun-temurun. Pemuda-pemuda dari kalangan biasa apabila ikut mengiring putra Raja berkhitan (bersunat) mendapat gelaran Mas dan gelaran Mas itu turun-temurun. Pengertian nama Mas berasal dari kata Emas, kata Emas dipendekkan menjadi Mas, Urai Riza Fahmi (2015;148).

Menunjuk sebutan atau gelaran Orang Kaya atau Datuk Kaya, gelaran itu secara istimewa diberikan oleh Raja atau Sultan kepada salah seorang hamba rakyat yang setia, mampu, berharta dan berwibawa dan pemuka salah satu kampung yang dipandang oleh penduduk orang yang terhormat, Raja (Sultan) mengangkat atau memberi gelaran sesudah mendapat informasi dari rakyat penduduk kampung itu, barulah Raja (Sultan) menetapkan pengangkatannya dengan gelaran Datuk Kaya atau Orang Kaya. Gelaran itu ada yang bernama Datuk Kaya Lela Mahkota, Datuk Kaya Indra Pahlawan, dan banyak yang lainnya lagi bermacam-macam namanya.

Orang-orang pendatang dari Bugis, Malaysia dan Brunai, Sultan memperkuat gelaran daerah-daerah itulah, apabila orang-orang pendatang memperlihatkan silsilah keturunan kebangsawannya, seperti Daeng, Keraeng, Enci', Awang. Lalu gelaran Tan, gelaran itu sejak dulu sudah diberikan Raja (Sultan) kepada para pahlawan Raja yang ikut membantu Raja dalam peperangan melawan musuh. Gelaran Tan itu turun temurun. Kata Tan dapat diartikan Pahlawan yang mempertahankan negeri dari serangan musuh, dan kata Tan itu kependekan kata Tahan.

Secara sederhana diceritakan perkataan sehari-hari di kalangan bangsawan keturunan Raja atau menteri dalam Kesultanan Sambas, yaitu berkata-kata berhadapan dengan Raja, kata aku (saya) semestinya diganti dengan kata Patik, yang dapat diartikan merendahkan diri dan menjunjung Raja diatas batu Kemala. Jikalau menyebut nama Si Anu atau Si Polan, semestinya diganti dengan kata Pacal Si Anu atau Pacal Si Polan. Kalau Raja menjawab dengan

kata aku, kata aku diganti dengan Beta. Berkata-kata dengan Menteri, kata aku semestinya Hamba Tuanku, atau Ulun dan jawaban menteri kalau berkata aku, aku diganti dengan Beta.

Percakapan hari-harian antara sesama keluarga bangsawan, kata aku (saya) berganti *Kole*, kata engkau (kamu) diganti dengan *Nike*. Menyebut Ayah dengan kata Abah, Romo atau Rame, untuk memanggil Ibu dengan kata Ibunda atau Bunda. Sedangkan kepada Nenek atau *Ne'Uwan* disebut Niang dan untuk Kakek atau *Ne'Aki* dengan kata Datuk. Namun sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi, kata-kata tersebut hanya digunakan untuk kalangan kerabat yang tinggal di Istana saja. Karena dizaman sekarang kebanyakan dari kalangan kerabat itu sendiri sudah menyadari atau telah hidup dalam dunia modern sehingga penggunaan kata-kata tersebut jadi terkesan kolot dan ketinggalan jaman, akibatnya sebutan-sebutan tersebut sudah luntur dan hampir punah keberadaannya

Banyak adat-istiadat yang berlaku di Kesultanan Sambas terjadi secara turun temurun begitu juga dalam hal upacara-upacara di Kesultanan. Sejak berdiri pada masa Sultan Muhammad Syafiuddin I, benda-benda pusaka kebesaran kerajaan selalu digunakan sebagai lambang maupun simbol, seperti kursi singgasana, bendera, payung ubur-ubur, tombak canggah, keris, pedang dan meriam lancang kuning. Dalam penggunaannya untuk upacara penobatan Sultan, perkawinan, kunjungan resmi dan kematian, payung kuning, payung ubur-ubur dan tombak canggah dibawa oleh kerabat Sultan dengan pakaian seragam warna merah kuning, Ansar Rahman (2001;46).

### **Perubahan Sistem Pemerintahan di Kesultanan Sambas**

Sebagai Kesultanan Islam, tata pemerintahan dan kemasyarakatan dijalankan menurut ajaran Islam dengan tetap mempertahankan adat istiadat. Dalam masalah hukum pidana dan perdata misalnya, membentuk lembaga pengadilan yang masing-masing disebut Balai Bidai yang diketuai oleh Kepala Desa, Kepala Adat atau Kepala Benua. Balai Bidai atau Pengadilan Adat dalam pelaksanaan hukumnya berpedoman kepada hukum adat setempat. Balai Raja diketuai oleh Kepala Distrik atau Demang sebagai hakim tunggal, paniteranya juru tulis Kepala Distrik, Jaksa Penuntut Umum Mantri Polisi. Tuntutan hukumnya berdasarkan KUHP dan peraturan lainnya, dengan diperkuat oleh Kepala Pemerintahan setempat (*Controleur*). Balai Kanun yang merupakan Kepala Pengadilan Tertinggi dipimpin langsung oleh Sultan yang beranggotakan Wazir, Imam dan Khatib, Erwin Mahrus (2003;78). Kesultanan Sambas menggunakan Kitab *Qaa Nun* sebagai undang-undang untuk mengatur kehidupan sosial seperti masalah tanah, warisan, perkawinan, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat Sambas.

Kedatangan pemerintah Hindia Belanda pertama kali ke Sambas dengan mengikat kontrak persahabatan pada 3 Februari 1819 semasa kekuasaan Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I, Ansar Rahman (2001;64). Campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan di Kesultanan Sambas membuat Sultan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan ataupun menetapkan suatu kebijakan, karena setiap mengambil keputusan harus mendapat persetujuan dari pihak Belanda. Kedatangan Pemerintah Hindia Belanda semula memang memberatkan pemerintahan Kesultanan, yaitu dengan mengikat kontrak mengenai uang pengganti kerugian hasil candu dan garam, mengambil alih kongsi emas.

Campur tangan pemerintah Belanda selain merugikan Kesultanan ternyata membawa kebaikan bagi kerabat Kesultanan, mereka memberi kesempatan kepada para kerabat untuk

mengenyam pendidikan ke Pulau Jawa. Seperti yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Syafiuddin II bersama saudaranya Raden Menteri pada tahun 1855. Kemudian didirikan *Volksschool* (Sekolah Rakyat), *Vervolgsschool* atau sekolah sambungan dan *Standardschool* (pengganti *Hollands Indlandsche School*), sehingga dapat meningkatkan taraf mendidikan di lingkungan Kesultanan Sambas dan memberi dampak yang sangat positif bagi kemajuan pemerintahan di Kesultanan Sambas.

Peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintahan Jepang pada tahun 1942, Syafaruddin Usman dan Isnawita Din (2009;22) berdampak kepada pemerintahan di Kesultanan Sambas. Politik propaganda yang dilancarkan Pemerintah Jepang sangat merugikan rakyat Sambas. Melihat hal yang sangat memprihatinkan tersebut maka Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin melancarkan aksi perlawanan namun akhirnya terbunuh. Pada tahun 1943. Maka diangkatlah Raden Taufik bergelar Pangeran Ratu sebagai Putra Mahkota dalam usia 13 tahun, namun dalam urusan pemerintahan ditentukan oleh Pemerintah Jepang dengan membentuk Majelis Kesultanan (*Zitiryō Hyogikai*). Jepang kemudian menyerah kepada Sekutu dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Rakyat Sambas mendengar proklamasi tersebut melalui siaran radio Serawak, namun secara resmi berita tersebut diterima pada 2 Oktober 1945. Karena pada saat itu pemerintah Jepang masih berkuasa dan diwilayah lain masih ada yang berjuang menantang Belanda. Kemerdekaan tidak serta merta diterima rakyat Sambas, karena pada akhir Agustus mendaratlah tentara Sekutu Australia yang membonceng tentara NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*). Residen NICA yang bersikeras ingin mengambil alih wilayah Indonesia dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), khusus wilayah Kalimantan Barat disebut dengan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibawah lingkungan Kerajaan Belanda. Dengan semangat yang kemerdekaan rakyat Sambas bertekad menantang kependudukan NICA di Sambas, dibentuklah organisasi-organisasi untuk melawan NICA seperti PERBIS (Persatuan Bangsa Sambas), PIM (Pemuda Indonesia Merdeka), dan GERINDOM (Gerakan Indonesia Merdeka).

Kesultanan Sambas mengalami kegoyahan sampai pada akhirnya tahun 1950 wilayah Sambas berdaulat dalam dalam pemerintahan Republik Indonesia. DIKB tetap menjadi kesatuan dalam RIS, sampai pada Negara Republik Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950. Surat Keputusan Mendagri 8 September 1951 wilayah Kalimantan Barat dibagi menjadi Kabupaten Administratif. Maka khususnya di Kabupaten Administratif Sambas, daerah Kesultanan Sambas dipimpin oleh Bupati, yang berkedudukan di Singkawang. Sambas kemudian menjadi wilayah Kecamatan sejak tahun 1999 dan akhirnya menjadi Ibu Kota Kabupaten Sambas.

### **Sistem Perkawinan Kesultanan Melayu**

Secara umum sistem perkawinan yang terjadi di lingkungan Kesultanan Melayu memiliki ciri khas yang sama, yaitu sistem perkawinan yang berlaku hanya pada kaum kerabat Kesultanan maupun kaum elit bangsawan. Namun pada abad XX tampaknya perkawinan tidak hanya terjadi antar kerabat atau elit istana, tetapi ada juga yang menikah dengan rakyat biasa.

Seperti sistem perkawinan di Kesultanan Pontianak yang dimulai dari seorang ulama yang bernama Syarif Hussein Bin Ahmed Algadri (1735) dijodohkan dengan Nyai Tua puteri keluarga Kerajaan Matan, Nyai Tua wafat menikah dengan Nyai Tengah, Nyai Tengah wafat menikah dengan Nyai Bungsu dan menjadi penasihat Sultan Giri Liya di Matan Kalimantan. Setelah terjadi perselisihan Syarif Hussein meminta perlindungan kepada Raja Mempawah Daeng Manambon lalu diangkat sebagai patih atau *Rijksbestuurder*. Anak dari Syarif Hussein dan Nyai Tua yang bernama Abdurrachman kemudian menikah dengan anak Daeng Manambon yang bernama Utin Tjindramidi. Kemudian selama merantau ke Banjarmasin (1768) ia lalu menikah dengan anak Sultan bernama Ratu Syahranum. Lalu akhirnya pulang ke Mempawah pada tahun 1771 karena Ayahndanya wafat. Pada hari Senin, 18 Sya'ban 1192 H tahun 1771 Masehi Syarif Abdurrachman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan pertama di Kesultanan Pontianak, Syafaruddin Usman (2000;9-24).

Sultan Syarif Abdurrachman Alkadrie mempunyai 25 isteri dengan 66 anak, anak laki-laki diberi gelar Syarif, anak perempuan diberi gelar Syarifah. Dilihat dari silsilah keluarganya, anak cucu Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie semuanya menikah dengan kaum elit Kesultanan maupun sesama kerabat Kesultanan Pontianak. Hal ini masih terlihat jelas sampai sekarang bahwa kerabat dari keturunan kerabat Kesultanan Pontianak menikah dengan para kaum elit bangsawan maupun kerabat. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat kerabat yang menikah dengan rakyat biasa dengan alasan tertentu

### **Sistem Perkawinan Kerabat Kesultanan**

Pada masa kekuasaan dipegang oleh Kesultanan Sambas hampir dari keseluruhan Sultan menikah secara resmi dengan sesama kerabatnya atau dengan kaum elit dari Kesultanan lain. Tujuan pernikahan tersebut pada intinya didasari dengan alasan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan agar tidak jatuh ke rakyat biasa dan untuk mempererat silaturahmi antar Kesultanan yang satu dengan lainnya. Kultur perkawinan seperti itu juga berlaku pada kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia dengan tujuan menjaga wibawa Raja-Raja dan sebagai bentuk peneguhan kekuasaan. Demikian juga para kerabat Sultan di Kesultanan Sambas, setiap kelompok Kesultanan cenderung mempertahankan posisinya yang terhormat dalam masyarakat. Perkawinan Sultan berkaitan dengan keturunan, sehingga silsilah Sultan berfungsi sebagai dasar legitimasi otoritasnya, Syafaruddin Usman (2011;101).

Perkawinan para Sultan ada yang berbentuk Poligami, memiliki satu permaisuri dan beberapa selir, ada yang memiliki banyak permaisuri dan banyak selir, namun ada juga yang berbentuk monogami. Perkawinan poligami seperti yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Syafiuddin II yang memerintah pada tahun 1866 sampai 1922 mempunyai seorang permaisuri bernama Raden Kahlijah bin Sultan Umar Kamaluddin digelar Ratu Anum Kesuma Ningrat dan seorang selir bernama Enci' Nauyah digelar Mas Sultan. Dapat dilihat bahwa pernikahan Sultan Muhammad Syafiuddin II tersebut menikah dari anak Sultan terdahulu, dan selirnya merupakan kaum elit bangsawan kerajaan.

Sultan Sambas yang ke-14 yaitu Raden Muhammad Aria Diningrat bergelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin II mempunyai seorang permaisuri yang bernama Raden Zohra Binti Pangeran Muda Nata Kesuma digelar Ratu Zohra dan seorang selir bernama Dinah. Telah disebutkan bahwa Permaisuri Sultan ke-14 merupakan kerabat yakni anak dari Pangeran

Muda Nata Kesuma bin Sultan Abubakar Tadjuddin (Sultan ke-11) dengan selirnya yang bernama Raden Ayu. Namun pernikahan dengan selirnya Dinah yang merupakan rakyat biasa. Kemudian Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsyafiuddin merupakan Sultan Sambas ke-15, yang juga menikah dengan kerabat Kesultanan yakni Raden Mahrum binti Pengeran Bendahara Seri Maharaja Muhammad Tayeb bergelar Ratu Anum. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim merupakan putra dari Pengeran Adipati Ahmad Bin Sultan Muhammad Syafiuddin II dengan permaisurinya yang bernama Utin Putri Binti Panembahan Muhammad Ibrahim Raja Mempawah.

Selanjutnya putra-putri Sultan Mulia Ibrahim menikah dengan kaum bangsawan seperti Raden Aniniyah/Raden Berti bersuamikan Gusti Kailani, Raden Maryam bersuamikan Daeng Subli bin Daeng Akib, Raden Hanisah bersuamikan Wan Usman, dan Daeng Subli Bin Daeng Akib, Raden Asmara bersuamikan Bahtiar, serta Raden Muhammad Taufiq digelar Pengeran Ratu beristrikan Urai Latifah Binti Pengeran Laksmana Hasnan Panji Kesuma.

### **Transformasi Pola Tertutup ke Pola Terbuka**

Sistem perkawinan yang mempertahankan kultur perkawinan tertutup antar kerabat Kesultanan dan elit istana seiring berjalannya waktu mengalami perubahan mulai lebih terbuka untuk rakyat biasa. Perubahan tersebut setidaknya dimulai dari perkawinan salah satu putri Sultan ke-14, Sultan Muhammad Mulia Ibrahim yang bernama Raden Asmara, yang menikah dengan Bahtiar dari rakyat biasa. Selanjutnya cucu dari Sultan Muhammad Mulia Ibrahim dari keturunan Raden Muhammad Taufik dan isterinya Urai Latifah binti Pengeran Laksmana Hassan Panji Kesuma yakni Raden Winata Kesuma atau yang akrab disapa Raden Wempi juga menikah dengan rakyat biasa bernama Endang Sri Muningsih tahun 1994. Demikian pula keturunan kelima Sultan Muhammad Syafiuddin II, bernama Urai Riza Fahmi juga menikah dengan rakyat biasa bernama Nurhidayati tahun 1999. Lalu adik dari Sultan Muhammad Syafiuddin yaitu Raden Syarifuddin digelar Pengeran Bendahara Seri Maharaja Ratu Mangkuningrat, istri kedua bernama Inci' Ipa (Bong Sie Fa), yang merupakan anak Kapiten Cina Bengkayang, Urai Riza Fahmi (wawancara, 2016).

Berkaitan tata cara pelaksanaan perkawinan kerabat Kesultanan umumnya sama seperti masyarakat Sambas yaitu dimulai dengan prosesi melamar dan antar cikram, kemudian adanya antar pinang untuk menyerahkan barang antaran, lalu ada yang dinamakan serah menyerahkan atau pulang memulangkan, mandi belulus, gulung tikar, *bepappas*, dan lain sebagainya, Pemerintah Kabupaten Sambas (2015;31). Namun, yang membedakan dalam perkawinan kerabat Kesultanan didampingi para penjaga yang menggunakan tombak, payung-payung kebesaran kerajaan, membawa keris serta pengantin perempuan menggunakan mahkota kerajaan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pola Perkawinan**

Kehadiran kaum terdidik yang melahirkan kaum intelektual yang ada di Kalimantan Barat mengakibatkan munculnya sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari kebijakan politik Etis, Dana Listiana (2014;30). Sesuai dengan semangat dan tekad segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berkeinginan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka para pemimpin masyarakat, tokoh agama dan beberapa perintis

kemerdekaan di daerah inipun tidak mau ketinggalan untuk ikut serta mengisi kemerdekaan, khususnya dalam lapangan pendidikan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat (1988;59). Menyikapi hal tersebut yang berkaitan dengan kehidupan individu, unsur-unsur budaya dalam suatu kelompok masyarakat ada yang mudah berubah dan ada pula yang sulit berubah. Demikian pula dengan individunya yang cepat dan ada yang lambat dalam proses menerima perubahan, bahkan ada individu yang cenderung menolak perubahan, Sujarwa (2001;21).

Seiring berkembangnya jaman yang semakin modern berdampak pada kemajuan pemahaman dan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, termasuk di kalangan kerabat Kesultanan. Urai Riza Fahmi yang merupakan keturunan kelima dari Sultan Muhammad Syafiuddin II dalam wawancaranya mengatakan bahwa menikah sesama kerabat merupakan hal yang kurang baik dilakukan, karena secara genetik menikah dengan seseorang yang mempunyai gen yang sama akan berpengaruh buruk dalam keturunan yang dihasilkan, apalagi kalau gen tersebut berasal dari garis keturunan laki-laki. Menikah sesama kerabat akan memunculkan gen-gen resesif yang memungkinkan munculnya penyakit menurun, Nunung Nurhayati dan Tatang Nugraha (2015;143).

Perkawinan sesama kerabat di Kesultanan Sambas dilakukan sejak dahulu dengan tujuan mempertahankan harta, kedudukan dan gelar, sampai mengabaikan aspek biologis. Sehingga dampak yang ditimbulkan akibat penyimpangan tersebut memberi pengaruh yang buruk bagi kehidupan seseorang yaitu menjadi berbeda dengan manusia pada umumnya baik itu memiliki IQ yang rendah, maupun mengalami penyakit keturunan. Selain itu sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat tidak baik kiranya hanya berkeluarga sesama kerabat Kesultanan saja, alangkah lebih baik menikah dengan seseorang yang berasal dari keluarga lain, dengan demikian hubungan silaturahmi akan terjaga dan sanak saudara akan bertambah.

Kemudian hal lain yang mempengaruhi adalah perubahan kekuasaan Kesultanan Sambas menjadi wilayah kekuasaan NKRI menyebabkan perubahan kultur Kesultanan, karena otoritas Kesultanan kurang diperhatikan. Kondisi Kesultanan Sambas yang masih memprihatinkan mendorong masyarakat untuk menumbuhkan kembali adat istiadat yang menjadi simbol wilayah Sambas yaitu kebangkitan Kesultanan Sambas. Untuk memenuhi tuntutan rakyat Sambas, maka akhirnya Raden Winata Kesuma dionobatkan menjadi Putra Mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Winata Kesuma pada hari Sabtu, 15 Juli 2000. Namun keberadaan Istana yang tidak bersinar seperti jaman dahulu menyebabkan keberadaan Istana hanya sebagai simbol kebudayaan. Pangeran Ratu melebur kedalam masyarakat dan hidup layaknya masyarakat biasa dan hidup apa adanya tanpa memandang status sosialnya sebagai seorang Putra Mahkota. Istana terlihat suram dan seperti tidak ada kekuatan keberadaan atas Istana tersebut. Terlebih lagi tidak ada biaya untuk mengurus Istana dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Sulitnya untuk memberi keyakinan kepada rakyat Sambas bahwa keberadaan Kesultanan masih ada memang susah dirasakan. Pemegang kekuasaan di Kesultanan Sambas sekarang adalah Pangeran Ratu Muhammad Tarhan (anak dari Pangeran Ratu Winata Kesuma dengan Endang Sri Muningsih) hanyalah simbol untuk menandakan Kesultanan Sambas belum musnah, Endang Sri Muningsih (wawancara;2016). Karena melihat keberadaan Kesultanan hanya sebagai simbol budaya dan pusat pariwisata, maka kekuasaan yang berpusat pada Sultan semakin memudar atau dengan kata lain wibawa dan legitimasi Sultan terhadap rakyat secara umum menurun. Oleh karena itu, belakangan ini tampak keturunan-

keturunan kerabat Kesultanan hidup membaaur dengan masyarakat pada umumnya. Kedudukan sebagai bangsawan dan status sosial tidak begitu diperhatikan, hidup layaknya masyarakat yang bebas untuk bermasyarakat dan menentukan tujuan hidup, termasuk dalam memilih pasangan dalam pernikahan yang dulunya hanya menikah dengan para bangsawan. Kerabat Kesultanan maupun kaum elit bangsawan sekarang telah hidup bermasyarakat dan dapat dijumpai hampir di setiap desa yang ada di wilayah Sambas.

## **PENUTUP**

Kesultanan Sambas yang berdiri sejak pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin I pada 9 Juli 1631, memang kental akan adat istiadatnya. Adat istiadat tersebut akhirnya menjadi suatu tradisi yang terjadi secara turun temurun di Kesultanan Sambas, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam hal pemegang kekuasaan di Kesultanan Sambas, Sultan yang memerintah akan mewariskan tahta pemerintahan kepada kerabat terdekatnya, baik itu kepada putranya, ataupun kepada saudara laki-laki. Untuk menjaga agar kekuasaan tersebut akan tetap menjadi kekuasaan para kerabat dari Kesultanan, maka perkawinan yang dilakukan antar sesama kerabat Kesultanan dan kaum elit lainnya. Perkawinan antar sesama kerabat pada dasarnya melalui sistem perjodohan oleh para orang tua kerabat. Mereka menginginkan anak-anaknya menikah dengan sesama sepupu maupun keponakannya untuk lebih mengeratkan persaudaraan diantara kerabat, agar harta benda peninggalan tidak menyebar ke pihak lain, dan untuk mempertahankan gelar juga kekuasaan.

Sejalan perkembangan waktu, sistem perkawinan mengalami perubahan yang memungkinkan menikahnya rakyat biasa dengan kerabat Kesultanan. Perubahan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu kehadiran kaum terdidik, terutama dimulai masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II. Masa ini Sambas mencapai puncak kejayaannya, rakyat Sambas hidup makmur dan dapat mengenyam pendidikan terutama kaum kerabat Kesultanan. Kemajuan tingkat pendidikan yang akhirnya mengubah pola pemikiran para kerabat, bahwa pernikahan sesama kerabat kurang baik secara kesehatan. Perubahan kekuasaan Kesultanan Sambas menjadi faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan pola perkawinan tersebut. Kedudukan Istana yang bukan lagi menjadi pusat pemerintahan tetapi hanya sebagai simbol budaya menyebabkan berkurangnya wibawa Kesultanan. Sehingga perkawinan antar kerabat mulai berkurang diperhatikan dan para kerabat Sultan lebih menginginkan hidup membaaur layaknya masyarakat biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas, (2013). *Budaya Sambas Gemilang Tempo Dulu*. Sambas: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas.
- Fahmi, Urai Riza, (2013). *Selayang Pandang Sejarah Kerajaan Islam Keraton Sambas*. Edisi ke-9. Bandung: CV. Yrama Widya.
- [Http://sarifitriawulandari.blogspot.com/2012/11/berbagai-pendekatan-psikologi-tentang.html](http://sarifitriawulandari.blogspot.com/2012/11/berbagai-pendekatan-psikologi-tentang.html), diakses pada 2015.
- Jaelani, (2013). *Kesultanan Sambas Kalimantan Barat Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX Studi Pola Kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II Tahun 1988-1922*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan.
- Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Listiana, Dana, (2014). *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Musa, Pabali, (2008). *Latar Belakang Sosial Politik Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsybandiyah Ahmad Khatib Sambas (1802-1878)*, Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, tidak diterbitkan.
- Mahrus, Erwin, (2003). *Shaykh Ahmad Khatib Sambas*. Pontianak: Badan Penerbit Universitas Tanjungpura Untan Press.
- Nurhayati, Nunung dan Tatang Nugraha, (2015). *Biologi Berbasis Pendidikan Karakter Bangsa untuk SMA*. Bandung: PT. Srikandi Empat Widya Utama.
- Pemerintah Kabupaten Sambas Daerah Tingkat II, (1997). *Usul Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Rangka Pengembangan Kabupaten Sambas Daerah Tingkat II Sambas*. Singkawang: Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, (2015). *Pantun dan Budaya Adat Istiadat Tata Cara Perkawinan Kabupaten Sambas*. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, (1988). *Sejarah Pendidikan Kalimantan Barat*. Pontianak: Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
- Rahman, Ansar, (2001). *Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah*. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Sujarwa, (2001). *Manusia dan Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sunandar, (2013). *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Al-Watzikhoebillah Sambas 1913-1976*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan.

- Tsafiuddin, Al Barkat, Muhammad, (1980). *Silsilah Raja Sambas*. terj. Ja' Achmad, A. Muin Ikram, Mawardi Rivai. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Usman, Syafaruddin, (2011). *Sambas Merajut Kisah Menenun Sejarah*. Pontianak: t.p.
- , (2000). *Sejarah Pemerintahan Kesultanan dan Kota Pontianak*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Usman, Syafaruddin dan Isnawita Din, (2009). *Peristiwa Mandor berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*. Yogyakarta: Media Pressindo.